

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, 2002, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abu Zahrah, Muhamad, 1996, *Al-Milkiyah wa Nazariyah al-Aqd al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Dar al-Fikr al-'Araby, Kairo.
- Al-Maliki, Abdurrahman, 1963, *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah al-Mutsla*, t.tp : Hizbut Tahrir.
- Al-Nabhani, 2004, *Al-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, Darul Ummah, Beirut.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin, 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative : Persepektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, Risalah Gusti, Surabaya.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin, 2003, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al Islam*, Darul Ummah, Beirut.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, 1968, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Dar al-Fikr, Bairut.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, t.t., Barut.
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Pustaka Asatruss, Jakarta.
- Ash- Shiddieqy, T.M Hasbie, 1989, *Pengantar Fikih Muamalah*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan , 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahhab, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta.
- B Miles, Mattew dan Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hasaballah, Ali, *Usul al-Tasyri al-Islami*, Dar al-Ma'arif, t.t, Kuwait.
- Hutagalung, Arie Sukanti, 2005, "*Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*", Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Ibnu Majah, Imam, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Fikr, t.t., Bairut.
- Ibrahim al-katib, Muhammad, 1989, *Al-Nizam al-Iqtishadi fi al-Islam*, Maktabat Haramain, Riyad.
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iskatrinah, 2004, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Litbang Pertanahan Indonesia, Dephan, Jakarta.
- Ismail, Nur Hasan, 2000, "*Otonomi Bidang Pertanahan : Reposisi Peran Pusat dan Daerah, dan Ideologi Politik Pertanahan*", Makalah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kantaprawira, Rusadi, 1998, "*Hukum dan Kekuasaan*", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1996, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fikih*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Kim, Jongwook and Joseph T.Mahoney, 2005, "Property Rights Theory, Transaction Cost Theory: An Organizational Economic Approach to Staregic Management", *Managerial and Decision Economics*.
- M Hadjon, Philipus, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- M. Bashir, Abdel Hameed, 2002, "*Property Rights, Institution and Economic Development: In Islamic Perspective*", *Humanomics* Vol. 18 No. ¾.
- Mahasari, Jamaludidin, 2008, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, Gama Media, Yogyakarta.

- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marbun, S.F, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Marbun, S.F. 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marbun, S.F., 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Marshall, Alfred, 1952, *Principles of Economics*, London: Macmillan and Co., Limited ST.
- Matutu, Mustamin Dg. dkk, 1999, *Mandat Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, UII Pers, Jakarta.
- Melianawaty, 2009, *Tata Cara Pembelian Hak Milik Atas Tanah Negara*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abi Abdillah, *Sahihul al-Bukhari*.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mulyosudarmo, Suwoto , 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta.
- Murhani, Suriansyah, 2009, *Kewenangan Pemerintah Dalam Mengurus Bidang Pertanahan*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Mustain, 2007, *Petanis VS Negara : Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Muthahhari, Murtadha , 1995, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung.
- Quthb, Sayyid , 1999, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Cet. V, Bandung.

- Rahman, Fazlur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam : Jilid II* , Terjm. Soeroyo dan Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Ridwan, H.R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Riwu Kaho, Josef, 2010, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2005, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sarundajang, SH, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Setiardja, A. Gunawan, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta.
- Sidharta, B. Arief, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung.
- Small, Garrick, 2003, "The Dimensions of Human Action and Property", *Pacific Rim Property Research journal* Vol. 9 No. 3 Desember.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono , 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Soemitro, Rony Hanitijio, 1983, *Metodologi Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suandra, Wayan, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharsini, Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutopo, H.B, 1998, *Motodologi Penelitian Hukum Bagian II*, UNS Press, Surabaya.

Syafrudin, Ateng, 2000, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Syaibani, Nabil Ahmad, 2004, *Qamus al-Syaybani li ‘Uhum al-Idarat*, Kurki, Bahrain.

Tucker, Mary Evelyn and John A. Grim, 2002, “*Introduction: The Emerging Alliance of World Religions and Ecology*” Deadalus.

Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahid, Muchtar, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta.

Zaidan, Abdul Karim, 2008, *Pengantar Studi Syari’ah*, Robbani Press, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan ;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Tanah Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4385).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3639).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4220).

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Peubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Internet ;

Adhyzal Kandary, "*Data Primer*", diakses dari <http://id.shvoong.com/social-sciences/1997495-data-primer/#ixzz2BSYC7Yak>

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross,
<http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotele-nicomachean.html>.

CNN Indonesia, 20 Mei 2016, diakses tanggal 12 April 2019

<http://daerah.sindonews.com/read/1327790/22/pt-kai-daop-4-semarang-amankan-semua-aset-yang-digunakan-warga-1-1533436027>, diakses tanggal 04 Mei 2019.

[http://jateng.tribunnews.com/2016/04/14/pt-kai-malah-seret-bpn-dan-sebut-sebut-mantan-wali-kota-semarang-sukawi-sutarip.TRIBUNJATENG.COM/Cetak/14 April 2016](http://jateng.tribunnews.com/2016/04/14/pt-kai-malah-seret-bpn-dan-sebut-sebut-mantan-wali-kota-semarang-sukawi-sutarip.TRIBUNJATENG.COM/Cetak/14%20April%202016)).

[http://jateng.tribunnews.com/2016/04/14/pt-kai-malah-seret-bpn-dan-sebut-sebut-mantan-wali-kota-semarang-sukawi-sutarip.TRIBUNJATENG.COM/Cetak/14 April 2016](http://jateng.tribunnews.com/2016/04/14/pt-kai-malah-seret-bpn-dan-sebut-sebut-mantan-wali-kota-semarang-sukawi-sutarip.TRIBUNJATENG.COM/Cetak/14%20April%202016)). diakses tanggal 02 Februari 2019.

<http://tekt-id.123dok.com/document/oy8xr9n2q-struktur-organ-gambaran-umum-pt-kereta-api-persero-daop-iv-semarang.html>, diakses tanggal 04 Mei 2019.

<http://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 11 Februari 2019

<https://daerah.sindonews.com/read/1327790/2/pt-kai-daop-4-semarang-amankan-semua-aset-yang-digunakan-warga-1533436022>, diakses tanggal 04 Mei 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang diakses 02 April 2019.

<https://nasional.tempo.co/read/772844/bpn-minta-pt-kai-buktikan-kepemilikan-lahan-di-kebonharjo> diakses tanggal 24 April 2019.

<http://properti.kompas.com/read/2016/05/12/193000321/Nih.Dua.Jenis.Tanah.yang.Dikuasai.Negara>. diakses tanggal 07 Juli 2019.

www.artikata.com, diakses pada tanggal 26 April 2019.

www.ensiklopedi_administratif.com, diakses pada tanggal 26 April 2019.